



STRATEGI ENKULTURASI NILAI-NILAI ANTI TINDAKAN KEKERASAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.1

Amri Marzali

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA
amarzali@yahoo.com

Abstrak

Negara Indonesia didirikan dalam setting negara multikultur untuk mengakomodir berbagai keragaman yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya, Pancasila dipilih sebagai dasar negara guna mengatur tata hidup bersama sebagai bangsa. Pengalaman hidup berbangsa di Indonesia menunjukkan bahwa idealisme multikultur itu sering ternodai oleh tindakan kekerasan karena gesekan antar elemen-elemen yang saling berbeda di dalamnya. Selama ini, penekanan pada tindakan pencegahan dan public policy diandalkan sebagai strategi penanganan konflik dan kerusuhan. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi sumbangan pemikiran tentang bagaimana caranya agar nilai-nilai anti tindakan kekerasan dapat ditanamkan dan dijaga dalam masyarakat multi-etnik Indonesia. Dengan memandang "budaya tindakan kekerasan" dari sudut tiga tataran, yaitu tataran struktural, kultural, dan institusional, strategi enkulturasi nilai-nilai anti kekerasan mendapat wujudnya secara berbeda-beda.

Kata kunci: Strategi Inkulturasi, Nilai-Nilai Anti Kekerasan, Struktural, Kultural, Institusional

Abstract

Indonesian state was founded in the multicultural country setting to accommodate a wide range of diversity that exists in it. That is why, Pancasila chosen as as the national principle to govern the diverse lives of the people as a nation. However, during the life of this nation as Indonesian, it has shown that the ideals of multiculturalism is often marred by acts of violence caused by friction between elements that differs from each others. All this time, the strategy of handling conflict and violence is emphasised on prevention and public policy. This paper is intended to contribute thoughts about how the values of anti-acts of violence can be implanted and maintained in a multiethnic society. By looking at the "culture of of violence" in terms of three levels, i.e. the level of structural, cultural, and institutional, the strategy of enculturation of non-violence values got its differs forms.

Keywords: Strategy of Enculturation, The Values of Non-Violence, Structural, Cultural, Institutional

PENDAHULUAN

Indonesia boleh dikatakan sebagai sebuah negara yang unik di Asia Tenggara, atau bahkan di dunia. Negara ini dimulai dari titik sekitar O, baik dari segi (a) pemerintahnya (government), (b) organisasi negaranya (state), dan (c) system pemerintahannya (governmental & political system). Indonesia adalah sebuah negara baru menggantikan negara lama Hindia Belanda pada tahun 1945, diperintah oleh satu bangsa baru. Pribumi Nusantara, yang menggantikan penjajah Belanda, dan menggunakan sistem pemerintahan baru bukan komunis bukan kapitalis, tetapi demokrasi Pancasila, untuk menggantikan sistem pemerintahan kolonial Barat. Ketika merdeka tahun 1945, sekitar 90% penduduk pribuminya adalah buta huruf dan SD dan tinggal di perdesaan.

Di Asia Tenggara keadaan yang seperti ini mungkin hanya dapat dibandingkan dengan Negara Myanmar dan Khmer, tidak dengan Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Filipina, atau pun Vietnam dan Laos yang komunis (Hall, 1973). Jika perbandingan kasar ini benar, kita dengan demikian seharusnya bersyukur bahwa keadaan Indonesia pada masa kini, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial adalah relatif lebih baik daripada Myanmar dan Khmer.

Pernyataan historis singkat di atas hanyalah sekedar mengingatkan bagi mereka yang tidak sabar dalam menunggu terwujudnya “Keadilan dan kerukunan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sehubungan dengan hal tersebut, di sini akan mengutip satu pengakuan jujur dari almarhum Jenderal Soemitro bahwa generasi beliau, yaitu “Generasi 1945,” tidak mampu menjalankan tugas yang sifatnya “mengisi” kemerdekaan. Generasi 1945 adalah generasi “yang bertugas mendobrak dan paling jauh adalah sebagai perintis, peletak dasar, bagi pengisian kemerdekaan oleh generasi selanjutnya” (Soemitro, 1992:7).

Tugas mengisi kemerdekaan, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan rukun-damai adalah tugas dari generasi selanjutnya, yaitu Generasi 1966. Namun nyatanya generasi ini pun tidak berhasil, sehingga terpaksa harus dikoreksi oleh Generasi 1998. Apakah pengalaman berguna yang dialami oleh Generasi 1945 dan Generasi 1966 dalam membangun masyarakat bangsa ini? Sekali lagi dikatakan oleh almarhum Jenderal Soemitro bahwa sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk tahun 1951, proses pembangunan berjalan, tetapi tanpa rencana dan perencanaan. Demikian pula metodenya tidak bisa lain yaitu metoda trial and error, karena bangsa Indonesia memang belum mempunyai pengalaman dalam mengelola negara apalagi republik yang berdaulat penuh dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke (Soemitro 1992: 33).

Tugas yang diemban sekarang oleh Generasi Reformasi, Generasi 1998, sangat banyak. Perjalanan masih jauh. Apakah kita masih akan bertahan dengan metoda trial and error seperti yang dijalankan oleh generasi almarhum Jenderal Soemitro di atas, sedangkan kini kita sudah punya banyak “orang pandai” hasil didikan dalam dan luar negeri? Tentu saja tidak. Kita mesti membuat perencanaan pembangunan masyarakat yang lebih matang dengan tujuan-tujuan yang terinci.

Konflik sosial dan kerusuhan kolektif yang marak sekitar masa sebelum dan sesudah kejatuhan Presiden Soeharto 1998 adalah satu pelajaran pahit yang perlu mendapat perhatian serius pemimpin dan cerdas pandai Indonesia yang bijaksana. Konflik sosial dan kerusuhan kolektif mengancam kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PENELITIAN TENTANG KONFLIK SOSIAL

Sudah banyak kajian dibuat orang tentang konflik sosial dan kerusuhan kolektif tersebut, baik oleh peneliti dalam maupun luar negeri. Di tempat kerja saya dulu, FISIP-UI, pernah ada lembaga-lembaga penelitian konflik yang bernama CERIC di bawah pimpinan Dr. Imam Prasodjo dan Laboratorium Sosiologi FISIP-UI di bawah pimpinan Dr. Iwan Gardono. Sayang sekali setelah kebakaran gedung Sosiologi FISIP-UI, saya tidak tahu lagi apakah buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada dalam librari lembaga-lembaga ini masih terselamatkan. Di LIPI ada Organisasi Kelompok Kerja Studi dan Kajian Daerah-daerah Rawan di Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Negara Riset RI Ketua LIPI (Riza Sihbudi dkk, 2001). Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pun membentuk satu Tim Penelitian di bawah pimpinan Prof. Parsudi Suparlan (Suparlan,1999). Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata juga membentuk satu “Kelompok” Task Force “Masalah Konflik di Indonesia” dengan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 12/SK/KBLD/VI/2001. Semua ini belum menyebut Tim-tim peneliti yang dibentuk oleh berbagai universitas di Indonesia dan luar negeri, dan berbagai lembaga luar, seperti MOST UNESCO, UNSFIR, CNRS, dan UNDP. Pokoknya, peristiwa konflik sosial dan kerusuhan kolektif yang terjadi di Indonesia sekitar masa sebelum dan sesudah kejatuhan Presiden Soeharto 1998 telah menjadi pusat perhatian dunia.

Penelitian-penelitian tentang hal ini telah menghasilkan berbagai laporan kajian. Sebagian adalah dalam bentuk database, sebagian lain dalam laporan ilmiah, dan yang lain lagi dalam bentuk laporan yang disertai dengan rekomendasi-rekomendasi bagi penyelesaian masalah. Di librari pribadi saya ada beberapa dokumen database, sekitar 70 buah buku terbitan Indonesia, beberapa jurnal dan majalah, satu tumpukan besar klipping koran dan mingguan, sejumlah naskah hasil seminar dan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang berisi tentang konflik sosial dan kerusuhan kolektif di berbagai tempat di Indonesia. Menurut Freek Colombijn, dalam katalog KITLV, ada 182 buku tentang Indonesia dengan kata kunci “kekerasan” yang diterbitkan antara tahun 2001-2003 (Dewi Fortuna Anwar dkk. 2005: 281). Terlalu banyak untuk disimak satu persatu dalam jangka waktu yang terbatas.

1. Kategori Konflik dan Kerusuhan

Sebagian orang membagi semua peristiwa konflik sosial atau kekerasan kolektif di Indonesia ke dalam beberapa kategori umum sbb: (a) Pemberontakan separatisme daerah (Republik Maluku Selatan, Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Papua Merdeka). (b) Pembrontakan mendirikan negara Indonesia dengan dasar ideologi yang baru (PRRI/PERMESTA, Darul Islam/TII; Gerakan 30 September). (c) Konflik etnik (Pribumi vs Tionghoa; Madura vs Dayak; Madura vs Melayu). (d) Konflik agama (di Poso; di Ambon tahun 2000an). (e) Konflik-konflik antardaerah, antardesa, antarkampung, antargeng, hubungan industri, dan lain-lain.

Manakala Tadjoeeddin (2002) membagi ke dalam empat kategori umum, yaitu: (a), Konflik komunal, yang terdiri dari sub-kategori: Konflik etnik, agama dan migrasi; Kerusuhan Mei 1998; Kerusuhan makanan; Konflik politik; Konflik memperebutkan sumberdaya; Kerusuhan dukun santet; Konflik antar desa/kampung. (b), Konflik separatisme. (c) Konflik negara vs komunitas. (d) Konflik hubungan industrial.

Tim Peneliti dari Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (P3PK-UGM) yang melakukan penelitian tentang Kekerasan Kolektif yang terjadi di 18 daerah di Indonesia pada tahun 1997-98 membagi kasus-kasus kekerasan yang mereka teliti ke dalam tiga kategori besar, yaitu konflik Agama, konflik Suku/Ras, dan konflik Politik (Mas'ood, 2000). Khusus untuk konflik horizontal, yaitu konflik antar kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat Indonesia, kategori yang sederhana dibuat oleh Tim Survey Kompas. Di bawah ini disajikan data hasil polling pendapat Kompas terhadap 1500 responden, tentang konflik yang paling mencemaskan di Indonesia sampai Desember 2000 (Ismail, 2011:1)

Tabel 1. Konflik Yang Paling Mencemaskan.

	Kategori konflik yang paling mencemaskan	Persentase jawaban responden
1	Konflik antarumat beragama	73%
2	Konflik antarsuku	81%
3	Konflik antarwilayah	90%

Santiago Villaveces-Izquierdo (dalam Dewi Fortuna Anwar dkk, 2005: 309), seorang konsultan asing tentang konflik sosial dan kerusuhan kolektif, mempunyai pendapat lain. Dia tidak setuju membagi-bagi konflik sosial dan kerusuhan kolektif di Indonesia ke dalam kategori-kategori tertentu.

“Berbagai dimensi, lapisan dan wajah konflik kekerasan yang terjadi di seluruh kepulauan itu dapat lebih mudah dipahami jika konflik tidak diberi label-label kesukuan dan

keagamaan yang mengerucutkannya ke dalam standar sempit tertentu itu, atau kategori-kategori konflik vertikal dan konflik horizontal, yang biasa digunakan dalam analisis. Berbagai bentuk kekerasan komunal (golongan, suku, agama, dan sebagainya) itu sering saling berkaitan dengan cara-cara bagaimana wewenang dan hirarki dipahami, dijalankan, dan terbentuk sepanjang sejarah.”

2. Faktor-Faktor Konflik dan Kerusuhan

Setelah mempelajari beberapa hasil penelitian mengenai konflik sosial di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sumber masalah konflik adalah bervariasi menurut kategori dan daerah konflik. Karena itu jalan keluar untuk penyelesaiannya tidak dapat berlaku secara umum untuk seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang singkat ini, belum dapat dirumuskan satu ringkasan umum tentang faktor-faktor dan rekomendasi-rekomendasi tentang konflik sosial dan kerusuhan kolektif ini.

STRATEGI PENANGANAN KONFLIK DAN KERUSUHAN

1. Penekanan Pada Cara Preventif

Tugas untuk menanggulangi ancaman kerukunan ini secara resmi semestinya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Namun demikian, nampaknya POLRI belum dapat dibiarkan menanganinya sendiri. Terlalu banyak keterbatasan-keterbatasan yang masih menggayuti institusi ini pada waktu itu. Karena itu Kepolisian seharusnya dibantu oleh masyarakat, terutama dalam hal penanganan konflik etnik dan konflik agama.

Ketika itu perhatian terhadap masalah kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lebih banyak diberikan kepada usaha-usaha kuratif. Pemecahan masalah diberikan setelah terjadi peristiwa-peristiwa gangguan terhadap kerukunan. Dalam istilah populer, usaha lebih banyak ditumpukan pada aspek “conflict resolution,” bukan “conflict prevention.”

Syukurlah, sejak keluarnya Undang-undang No. 2/2002, POLRI secara resmi telah dipisahkan dari TNI. Terutama setelah bom Bali dan Manado, Oktober 2002, POLRI makin serius dalam melakukan reformasi ke dalam. POLRI mulai menerapkan strategi COP (Community Oriented Policing), yaitu kepolisian yang berorientasi masyarakat setempat, dengan dua tujuan, yaitu: (a) meningkatkan pembangunan budaya sipil dan praktik-praktik kewarganegaraan yang baik dalam kalangan kepolisian dan warga masyarakat, dan (b) mengubah pendekatan kepolisian pada masalah keamanan dan ketertiban umum dari model yang reaktif yang melihat warga masyarakat sebagai musuh potensial, menjadi model pencegahan yang melihat warga masyarakat sebagai pelanggan layanan kepolisian (hal. 312).

2. Penekanan Pada Public Policy

Lain lagi pandangan dari pakar sosial LIPI. Dikatakan oleh Dewi Fortuna Anwar (2005: viii) dalam buku prosiding Konflik Di Asia Pasifik,

“Sudah banyak sekali hasil penelitian, hasil kerja keras akademisi yang sudah mempunyai nama dan belum mempunyai nama, selama berpekan-pekan dan berbulan-bulan yang tidak terhitung, yang telah diterbitkan dan kemudian dibiarkan berdebu dan karena itu tidak berperan dalam dalam penyusunan kebijakan.”

Seterusnya kata Dewi Fortuna Anwar,

“Perpustakaan PDII-LIPI, yang menyimpan sumberdaya itu, sedang mencari cara-cara untuk menyebarluaskan bahan-bahan rujukan tentang konflik ke kantor-kantor cabangnya di daerah dan ke universitas-universitas diseluruh Indonesia dengan CD-ROM” (hal. xii).

Mengikuti saran Dewi Fortuna Anwar, dalam menangani konflik sosial dan kerusuhan kolektif ini, sudah selayaknya kita bergerak pada tataran policy making. Tidak lagi melakukan penelitian-penelitian mencari data lapangan, dan juga tidak menggunakan metode trial and error seperti yang dikatakan almarhum jenderal Soemintoro. Tugas kita kini adalah melakukan riset kepustakaan bagi menelurkan public policy tentang Pencegahan Konflik Sosial dan Kerusuhan Kolektif, khususnya lagi tentang Pembinaan Kerukunan Sosial dalam Masyarakat Indonesia yang Multikultural.

FOKUS BAHASAN

Tulisan ini memusatkan perhatian pada strategi kultural yang dapat dikembangkan dalam membangun pergaulan sosial yang rukun dalam masyarakat Indonesia yang multi-etnik dan multi-agama. Bila MPR telah menetapkan Empat Pilar negara-bangsa Indonesia, yaitu: (a) Dasar negara, Pancasila, (b) Konstitusi, Undang-undang Dasar 1945, (c) Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (d) Motto masyarakat negara-bangsa, Bhinneka Tunggal Ika maka tulisan ini memusatkan perhatian pada Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimanakah caranya agar nilai-nilai anti tindakan kekerasan dapat ditanamkan dan dijaga dalam masyarakat multi-etnik Indonesia ?

1. Beberapa Pilihan Strategi

Dalam tulisan ini saya akan melihat “budaya tindakan kekerasan” dari sudut tiga tataran, yaitu tataran struktural, kultural, dan institusional. Strategi pada masing-masing tataran adalah berbeda. Di bawah ini strategi itu akan disajikan.

Pada tataran struktural, di bawah ini dikutip paparan yang diberikan dalam buku Burhanudin dkk. (2000), bahwa: (a) Akar kerusuhan sejauh ini bukanlah pertentangan agama dan etnis semata-mata, tetapi melibatkan akumulasi dan komplikasi berbagai penyebab yang lebih kompleks, yaitu latar belakang sosial, ekonomi dan politik (hal. xii). (b) Lokalitas akan mengundang konflik dan kerusuhan jika terdapat ketidakadilan dalam (1) pembagian sumber daya ekonomi dan (2) partisipasi dalam pengambilan keputusan (hal. 9). (c) Faktor-faktor pemicu konflik dan kerusuhan adalah: (*) Pendirian rumah ibadah tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi umat beragama. (*) Penyiaran agama yang dilakukan secara lisan, media cetak dan elektronik yang diarahkan kepada penganut agama lain. (*) Bantuan luar negeri, baik materi maupun tenaga ahli, yang diarahkan untuk mengembangkan dan menyebarkan suatu agama tanpa mengikuti peraturan yang ada. (*) Perkawinan berbeda agama sering menyeret kelompok umat beragama, khususnya yang menyangkut warisan dan hukum perkawinan. (*) Perayaan hari besar keagamaan yang kurang mempertimbangkan kondisi, situasi, dan lokasi. (*) Penodaan dan pelecehan doktrin dan keyakinan agama lain. (*) Kegiatan aliran sempalan yang menyimpang dari ajaran agama utama (hal. 29-30). (d) Akibat dari keadaan ini, sikap umum masyarakat Indonesia yang selama ini moderat semakin terdorong ke arah yang lebih eksklusif, yang bisa menjadi pemicu gejolak sosial. Pandangan teologis yang eksklusif ini paling banyak dalam kalangan responden penyiar agama Islam (hal. 138). (e) Termasuk dalam tataran struktural, saya mengusulkan agar Pemerintah mengawasi hakim-hakim secara ketat agar mereka membuat keputusan yang adil dalam mahkamah. (f) Seterusnya, Pemerintah juga harus menghukum oknum-oknum POLRI dan TNI yang melakukan praktik tak terpuji beking-beking. (g) Posisi politik DPR sudah kebablasan terlalu kuat, tanpa institusi pengontrol yang efektif. Untuk itu diperlukan penguatan fungsi politik DPD dan pembentukan institusi pengontrol tindakan politik anggota DPR.

Pada tataran kultural, akan dikutip satu pandangan yang diberikan oleh seorang pakar dari Vrije Universiteit, Amsterdam, Freek Colombijn (2005), yang mengatakan bahwa sumber dari konflik sosial dan kerusuhan kolektif di Indonesia adalah apa yang disebut “budaya praktik kekerasan.”

“Budaya praktik kekerasan ada di Indonesia karena praktik kekerasan merupakan salah satu cara yang diterima secara sosial untuk mengatasi konflik sosial.”

“Dari kenyataan sejarah mengenai “budaya praktik kekerasan” ini dapat dikatakan bahwa perilaku semacam ini sudah lama ada dan tidak mudah ditinggalkan oleh pelakunya.” Budaya praktik kekerasan, meski marak pada zaman Orde Baru yang militeristik, namun dia jauh lebih tua dari rejim itu. Kiranya sejarah pernah mencatat apa yang disebut sebagai budaya praktik kekerasan dalam berbagai masyarakat etnik di Indonesia, seperti “Mengayau Dayak,” “Carok Madura,” “Aceh bunuh kapir,” “Amuk,” “Jalo,” “Legalisasi sosial pembunuhan menjaga siri” pada Orang Bugis,” dan lain-lain (Freek Colombijn, 2005: 282).

Ide “budaya praktik kekerasan” adalah hasil dari pengamatan bahwa sejumlah bentuk kekerasan telah menjadi bagian dari repertoire perilaku sosial sepanjang sejarah Nusantara. Ide ini penting artinya paling tidak karena dua alasan. Pertama ide ini menjelaskan mengapa kekerasan secara sosial dapat diterima dalam situasi-situasi tertentu. Kedua, ide bahwa kekerasan dapat dilihat sebagai praktek budaya dapat membuat kita menyadari bahwa kekerasan adalah perilaku yang dipelajari (hal. 293).

Jika seseorang melakukan eksperimen dengan perilaku agresif dan kekerasan, dan dia menemukan bahwa eksperimen ini menguntungkan, maka perilaku ini berarti mempunyai manfaat yang tinggi (hal. 293). Maka berkembanglah budaya tindakan kekerasan. Tetapi jika perilaku kekerasan tidak mendapat imbalan manfaat, atau bahkan dihukum, kemungkinan orang akan berpikir panjang sebelum berniat melakukan kekerasan. Budaya praktik kekerasan akan makin menghilang jika berbagai perilaku damai diberi pujian dan imbalan positif (hal. 302).

Salah satu jalan yang sangat direkomendasikan oleh Freek Colombijn untuk menghentikan virus kekerasan adalah pendidikan dan penegakkan moral. Anjuran lain adalah memperkuat demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia (hal. 303). Di bawah ini adalah beberapa rekomendasi konkrit yang diberikan oleh Freek Colombijn (hal. 307): (a) Negara perlu menggunakan mesin propaganda untuk menyebarkan ide tentang penghargaan terhadap kemanusiaan. (b) Negara harus melarang pers menggambarkan secara rinci tentang pengeroyokan terhadap pencuri. (c) Organisasi sosial dan organisasi setempat mengajarkan anak-anak dan orang dewasa dengan metode role game dalam memberikan reaksi yang tepat ketika mendengar teriakan “maling, maling.” (d) Masyarakat atau Pemerintah memberi imbalan kepada institusi dan organisasi sipil yang berhasil menangkap basah pencuri, tetapi tidak mengeroyoknya, melainkan menyerahkan kepada polisi tanpa dcederai. (e) Masyarakat atau Pemerintah mengajar preman tentang harga diri, mematuhi peraturan, dan mencari pekerjaan yang terhormat. (f) Polisi dan TNI memberi imbalan positif bagi perwira yang berhasil mengendalikan perilaku agresif dan kekerasan anak buahnya. (g) Masyarakat harus menerima hasil pemilihan umum, setelah hasilnya dikonfirmasi oleh lembaga yang berwenang. (h) Anggota masyarakat menggunakan media canggih (internet, fb, tweeter, TV, konser pop, dll) dalam menyebarkan pesan tentang baiknya berperilaku tanpa kekerasan. Hanya pecundang dan manusia rendah yang suka menggunakan otot, pisau, dan senjata dalam berhadapan dengan orang lain.

Termasuk strategi pada tataran kultural adalah penyusunan dan pelaksanaan Kurikulum 2013 secara efektif. Kami Tim Penyusunan Kurikulum Antropologi untuk SMA telah menetapkan Kurikulum Antropologi tersebut sebagai berikut. Di bawah ini adalah tabel yang menggambarkan Kompetensi Dasar 1 dan 2 yang harus dicapai oleh siswa Antropologi dari Kelas X sampai Kelas XII. Kompetensi Dasar 1 dan 2 berada dalam ranah afektif, yaitu nilai-nilai kultural tentang hidup rukun dan bermoral agama. Sedangkan Kompetensi Dasar 3 dan 4, yaitu kompetensi dalam ranah kognitif dan psikomotor, tidak dicantumkan di sini, karena hal itu sudah berkenaan dengan isi pengetahuan antropologi dan cara mempelajarinya.

Tabel 2. KOMPETENSI DASAR 1 dan 2 ANTROPOLOGI UNTUK SISWA SMA

KELAS	KOMPETENSI DASAR
Kelas X	1. Memiliki keyakinan dan sikap religius, dan etika penghormatan terhadap agama lain dalam rangka membangun masyarakat multietnik Indonesia yang harmonis.
	2. Memililiki nilai-nilai dan sikap manusia Indonesia yang berbudi luhur (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif dan proaktif) dalam rangka membangun masyarakat multietnik Indonesia yang harmonis.
Kelas XI	1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, menerima dan menghargai perbedaan religi, agama, dan kepercayaan, dalam rangka membangun masyarakat multietnik Indonesia yang harmonis dan manusia Indonesia yang religius dan berbudi luhur.
	2. Bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan nilai kultural Indonesia dalam rangka membangun masyarakat multietnik Indonesia yang harmonis dan manusia Indonesia yang religius dan berbudi luhur.

Kelas XII	1. Memberi solusi secara damai terhadap tindakan-tindakan yang mencemarkan agama, dan terhadap masalah-masalah kerukunan antar umat beragama dalam rangka membangun masyarakat multietnik Indonesia yang harmonis dan manusia Indonesia yang religius dan berbudi luhur.
	2. Memberi contoh kepada
	masyarakat sekeliling membangun masyarakat multietnik Indonesia yang harmonis dan manusia Indonesia yang religius serta berbudi luhur.

Pada tataran institusional, Pemerintah perlu menggalakkan masyarakat untuk membentuk organisasi-organisasi sosial yang melembaga (LSM) yang khusus bertugas dalam menghidupkan kembali institusi-institusi kerukunan sosial tradisional dengan cara yang baru yang lebih efektif, pada level Kecamatan/ terlembaga (institutionalized) dalam masyarakat.

Bagaimanakah metode dan teknik yang dapat digunakan dalam membangun kembali institusi tradisional lokal ini. Saya percaya kawan-kawan dari LSM dan pemerintah daerah punya banyak khazanah metode dan teknik, satu diantaranya yang terbaru adalah apa yang disebut sebagai metode Appreciative Inquiry.² Pemerintah perlu memberi bantuan khusus bagi penerbitan buku-buku cerita kanak-kanak, novel kanak-kanak, dan komik-komik yang berisi nilai-nilai kerukunan sosial, atau nilai-nilai anti budaya tindakan kekerasan.

Daftar Pustaka

- Burhanudin, Jajat, Arief (eds.). 2000. Sistem Siaga Dini terhadap Kerusakan Sosial. Jakarta: Badan Litbang Agama Depag RI dan PPIM.
- Dewi Fortuna Anwar dkk. 2005. Konflik Kekerasan Internal. Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV Jakarta.
- Freek Colombijn. 2005. "Budaya praktik kekerasan di Indonesia. Pelajaran dari sejarah," dalam Dewi Fortuna Anwar dkk., Konflik Kekerasan Internal. Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV Jakarta.
- Hall, D.G.E. 1973. Sejarah Asia Tenggara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ismail, Nawari. 2011. Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal. Bandung: Lubuk Agung.

-
- Mas'oed, Mohtar; Mochammad Maksum; & Moh Soehadha. 2000. *Kekerasan Kolektif; Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Riza Sihbudi dkk. 2001. *Bara Dalam Sekam. Identifikasi Akar masalah dan Solusi Atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papus, & Riau*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Soemitro. 1992. *Mengungkap Masalah Menatap Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suparlan, Parsudi. "Orang Madura Punya Prinsip Vendetta," *mingguan Detektif Romantika*, 3-8 Mei 1999.
- Tadjoeddin, Mohammad Zulfan. 2002. *Database on Social Violence in Indonesia*, UNSFIR.